

**MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG-
PANIMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SERANG NOMOR 98/PDT.G/2018/PN SRG)
INTISARI**

oleh:

Untung Kurniadi¹ dan Nurhasan Ismail²

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak selalu berjalan dengan lancar dan dapat menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa yang sering terjadi dalam praktiknya adalah permasalahan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang tidak kunjung menemukan titik temu. Hal ini dapat berujung diajukannya gugatan ke pengadilan. Mediasi merupakan *primum remedium* sebelum diperiksanya perkara di pengadilan yang mengutamakan penyelesaian secara *win-win solution*, sehingga perlu dikaji peran mediasi dalam mengakomodasi kepentingan para pihak apabila diterapkan untuk menyelesaikan sengketa penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sengketa yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengenai nominal ganti kerugian pelepasan hak atas tanah dan menganalisis bagaimana peran mediasi dalam mengakomodasi kepentingan para pihak dalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung wawancara narasumber. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara terhadap narasumber dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu: pertama, sengketa yang terjadi dalam dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Srg merupakan sengketa pertanahan yang berbentuk suatu keberatan atas ditetapkannya bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dinilai oleh penilai (*appraisal*). Kedua, mediasi yang dilakukan dalam perkara dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Srg memegang peranan penting dalam mengakomodasi kepentingan Penggugat dan Para Tergugat dimana tidak hanya pokok permasalahan ganti kerugian saja yang terselesaikan, namun juga dibangunnya kerja sama yang positif antara Penggugat dan Para Tergugat.

Kata kunci: pengadaan tanah, kepentingan umum, mediasi.

¹ Mahasiswa Program S-2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta.

² Guru Besar dan Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta.

**MEDIATION IN LAND ACQUISITION FOR PUBLIC PURPOSE
CONSTRUCTION DISPUTE RESOLUTION ON SERANG-
PANIMBANG HIGHWAY (CASE STUDY SERANG DISTRICT
COURT'S DECISION NUMBER 98/PDT.G/2018/PN SRG)**

ABSTRACT

by:

Untung Kurniadi³ and Nurhasan Ismail⁴

Land acquisition for public purpose often does not go according to the plan and even may rise dispute. One of the most common disputes in practice is determining the form and/or amount of compensation. The discussion often leads to deadlock and the land right holder files a lawsuit to the court. Mediation is *primum remedium* before resorting to the court proceedings which prioritize win-win solution dispute settlement; therefore, it needs to be analyzed the role of mediation in accommodating the parties' interests if it is applied to resolve land acquisition for public purpose dispute, specifically in determining form/and or amount of compensation.

This research aims to analyze land acquisition for public purpose disputes, especially in determining form/and or amount of compensation, and also analyze the role of mediation in accommodating the parties' interests when it is applied to resolve land acquisition for public purpose dispute. This research is normative which is supported by data from interviews. Primary data is gathered by direct interview while the secondary data is obtained by literature study which further analyzed using qualitative method.

Based on this research, it can be concluded that land acquisition for public purpose dispute in case number 98/Pdt.G/2018/PN Srg is a land dispute in determining form/and or amount of compensation of land, building, plant, and/or other things appraised by the appraisal and also the mediation performed in case number 98/Pdt.G/2018/PN Srg holds an important role in accommodating plaintiff and the defendants' interests which not only resolving the main issue but also lead to cooperation between the parties.

Key words: land acquisition, public purpose, mediation.

³ Student of Master in Law Degree of Faculty of Law, Gadjah Mada University, Jakarta Campus.

⁴ Lecturer of Master in Law Degree of Faculty of Law, Gadjah Mada University, Jakarta Campus.